



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 31936207 - 3905650

Nomor : 1419 /Ses/03/2008

14 Maret 2008

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Informasi Beasiswa Gelar
Pusbindiklatren Bappenas
Tahun 2009

Kepada Yth;

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama
Departemen/LPND;
2. Deputi Sumber Daya Manusia POLRI;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
(daftar terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui peningkatan potensi SDM di dalamnya serta sejalan dengan fungsi Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, maka Bappenas pada Anggaran Tahun Dinas 2009 Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas kembali memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi staf perencana yang bekerja di Bappenas, Unit Perencanaan di Departemen/LPND, Bappeda atau nama lain, dan unit perencanaan di Dinas Teknis pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memperoleh Beasiswa Gelar Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2008 untuk program : (a) S2 Dalam Negeri 13 Bulan; (b) S2 *Double Degree*, (c) S2 Luar Negeri, S3 Dalam Negeri dan (d) S3 *Linkage*.

Untuk seleksi beasiswa tahun 2009 dan seterusnya, Pusbindiklatren Bappenas membuka kesempatan menyampaikan usulan calon peserta melalui pendaftaran sepanjang tahun. Dengan demikian, dimulai dengan seleksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 ini, selanjutnya Pusbindiklatren Bappenas akan memiliki jadwal tetap, yaitu untuk pelaksanaan TPA setiap bulan Agustus dan pelaksanaan TOEFL setiap bulan September.

NO	KEGIATAN	JADWAL UNTUK PROGRAM S2 DD, S2 DN, S2 LN, S3 DN, S3 LINKAGE
1	Surat Edaran Sesmen	Maret 2008
2	Batas pengajuan usulan untuk TPA tahun 2008	1 Agustus 2008
3	TPA Nasional	23 Agustus 2008
4	TOEFL Nasional	27 September 2008
5	BEAP	Mei - Juli 2009 dan/atau Sept - Nov 2009
6	EAP	M II Feb s.d. M II Agustus 2009

Sedangkan proses pengusulan peserta sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu secara resmi diusulkan oleh instansi asalnya melalui pejabat pengelola kepegawaian atau atasan langsung (minimal eselon II) dalam surat yang menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi dan program beasiswa gelar yang diminati. Kriteria pelamar

beasiswa program gelar Pusbindiklatren Bappenas adalah PNS yang memenuhi syarat sesuai yang tercantum pada Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan JFP 2008 dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2 serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S3 untuk yang melamar beasiswa S3.

Mengingat terbatasnya dana, beasiswa Pusbindiklatren Bappenas ini dilaksanakan selain melalui mekanisme *cost sharing* tipe I (lampiran 3), mulai tahun 2006 yang lalu khusus untuk S2 13 Bulan Dalam Negeri juga dibuka kemungkinan melalui mekanisme *cost sharing* tipe IV dengan penjelasan rinci sebagaimana terlampir (lampiran 4). *Cost Sharing* tipe IV adalah beasiswa Pusbindiklatren Bappenas yang terdiri dari SPP (*tuition fee*) dan penulisan tesis.

Informasi mengenai persyaratan peserta, selain dapat dilihat dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana, yang secara singkat disajikan dalam lembar Informasi Program Beasiswa Pusbindiklatren Tahun 2008 (lampiran 1). Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut silakan menghubungi (021) 31931465, 31931447, 31931234, 3103705, e-mail: pusbindiklatren@bappenas.go.id, atau melihat informasi pada situs Pusbindiklatren, Bappenas melalui situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Syahrial Loetan

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Gubernur/Walikota/Bupati;
3. Biro/Bagian Kepegawaian Departemen/LPND/POLRI;
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. PPK PSDMA Bappenas tahun 2008.

Kepada Yth.:

A. BIRO KEPEGAWAIAN DAN PUSDIKLAT DEPARTEMEN/LPND :

1. Sekretariat Negara;
2. Departemen Agama;
3. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Departemen Kelautan dan Perikanan;
5. Departemen Perhubungan;
6. Departemen Perindustrian;
7. Departemen Perdagangan;
8. Departemen Pekerjaan Umum;
9. Departemen Pertanian;
10. Departemen Koperasi dan UKM;
11. Departemen Kehutanan;
12. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Departemen Sosial;
14. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
15. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
16. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
17. Kementerian Koordinator Perekonomian;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
19. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL);
20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
21. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
22. Badan Pusat Statistik (BPS);
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
24. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
25. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG);
26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
27. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
28. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
29. Arsip Nasional (ARNAS);
30. Perpustakaan Nasional.

B. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

1. Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Sumatera Utara;
3. Sumatera Selatan;
4. Sumatera Barat;
5. Sulawesi Utara;
6. Sulawesi Tenggara;
7. Sulawesi Tengah;
8. Sulawesi Selatan;
9. Sulawesi Barat;
10. Gorontalo;
11. Bangka Belitung;
12. Bengkulu;
13. Jambi;
14. Bali;
15. DKI;
16. Banten;
17. D I Y;
18. Irjabar;
19. Lampung;
20. Jawa Barat;
21. Jawa Tengah;
22. Jawa Timur;
23. Kalimantan Barat;
24. Kalimantan Selatan;
25. Kalimantan Tengah;
26. Kalimantan Timur;
27. Maluku;
28. Maluku Utara;
29. NTB;
30. NTT;
31. Riau;
32. Kepulauan Riau;
33. Papua;



REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 336207 - 3905650

INFORMASI PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN TAHUN 2009

A. PROGRAM BEASISWA YANG DITAWARKAN:

1. Program S3 Dalam Negeri: peserta dapat memilih salah satu program studi di Universitas Dalam Negeri yang direkomendasikan oleh Pusbindiklatren. Khusus untuk program S3 Dalam Negeri, penerima beasiswa Pusbindiklatren Bappenas untuk program S3 diberi waktu 1 (satu) tahun untuk melamar di perguruan tinggi yang mempunyai kerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas;
2. Program S2 13 bulan di 17 program studi pada 11 Universitas dalam negeri, yang direkomendasikan oleh Pusbindiklatren;
3. Program S2 *double degree* tahun akademis 2009 pada 6 Universitas di Indonesia yang bekerjasama dengan universitas di luar negeri: peserta program ini akan mengikuti kuliah selama 1 tahun di salah satu Universitas di Indonesia dan 1 tahun berikutnya di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sebelum kuliah dimulai *S2 Double Degree* dimulai, Pusbindiklatren juga memberikan beasiswa persiapan bahasa Inggris di Pusat Bahasa yang ditunjuk oleh Pusbindiklatren selama 5,5 bulan bagi peserta yang mempunyai nilai TOEFL sekurang-kurangnya 450, untuk mencapai nilai TOEFL 550.
 - Apabila peserta tidak dapat mencapai nilai TOEFL 550, yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai TOEFL selama mengikuti tahun pertama program *S2 Double Degree* di Indonesia;
 - Apabila tidak lulus seleksi ke luar negeri, maka pada tahun kedua peserta akan meneruskan di dalam negeri, dan untuk itu hanya memperoleh 1 gelar dari universitas di dalam negeri;
 - Mereka yang tidak lulus seleksi luar negeri tersebut, jika nilai TOEFL-nya lebih dari 550 akan mendapatkan biaya hidup selama jangka waktu program reguler pada program studi yang diambil (18 bulan);
 - Sedangkan bagi mereka yang tidak lulus seleksi luar negeri karena nilai TOEFLnya kurang dari 550 hanya akan mendapatkan biaya hidup sampai dengan 13 bulan;
 - Khusus untuk peserta *Double Degree* di Indonesia dan di Perancis, peserta akan diberikan persiapan bahasa Perancis selama 11 bulan untuk mendapatkan sertifikat DELF 4.

Khusus untuk program S3 *Linkage*, calon sudah harus mempunyai surat penerimaan dari universitas yang direkomendasikan oleh Pusbindiklatren Bappenas yang mempunyai kerjasama dengan universitas di luar negeri;

4. Persiapan Bahasa Inggris (*English for Academic Purposes*) untuk program S2 di Luar Negeri. Program ini memanfaatkan Beasiswa S2 pemerintah asing atau institusi internasional yang selama ini telah tersedia bagi Indonesia, seperti STUNED dari Belanda, ADS dari Australia, dan beasiswa Kedubes Perancis dari Pemerintah Perancis bagi peserta yang telah memiliki nilai TOEFL 550. Untuk itu, Pusbindiklatren akan memberikan beasiswa persiapan bahasa Inggris (*EAP=English for Academic Purpose*) di Jakarta selama 5,5 bulan bagi peserta yang mempunyai nilai TOEFL sekurang-kurangnya 450, dan apabila nilai TOEFL peserta (selama atau setelah kursus) telah mencapai 550, Pusbindiklatren akan membantu peserta untuk memperoleh Beasiswa S2 tersebut di atas. bagi peserta S2 ke Perancis akan mendapatkan pelatihan bahasa Perancis selama 11 bulan untuk memperoleh sertifikat DELF 4

B. PERSYARATAN CALON PESERTA

	DIKLAT GELAR									
	S3 DN / S3 LINKAGE	S2 DN	S2 DD		S2 INTERNASIONAL	S2 LN				
			JEPANG & BELANDA	PERANCIS		UNSYIAH, ACEH	BLD	AUST	JPN	P' CIS
I. SYARAT ADMINISTRATIF										
a. Pengusulan dari instansi	Min UKE II	Min UKE II	Min UKE II	Min UKE II	Min UKE II	Min UKE II				
b. Unit Kerja	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan				
c. PNS 100% gol. III/a Minimal	2 thn	2 thn	2 thn	1thn	2 thn	2 thn		1 thn		
d. Strata Pendidikan Minimal	S2	S1	S1	S1	S1	S1				
e. Minimal Tahun Lulus S1/S2	2 thn	2 thn	2 thn	2 thn	2 thn	2 thn				
f. Umur Maksimal	40 thn	40 thn	38 thn	38 thn	38 thn	38 thn	38 thn	38 thn	38 thn	
g. IPK Minimal	3,25	2,5	2,75	2,75	2,75	2,75	2,90	2,75	3,00	
II. SELEKSI NASIONAL										
a. Tes Potensi Akademik (TPA)										
- Pusat	565	565	565	565	565	565				
- Pusat Luar Jawa	565	525	525	525	525	525				
- Pemda Jawa	565	525	525	525	525	525				
- Pemda Luar Jawa	565	500	500	500	500	500				
b. TOEFL Seleksi Minimal	500 / 550	400	450	450	450	450				
TOEFL Setelah EAP			550	550	550	550	500	530	500	
c. Wawancara	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen				

C. PILIHAN PROGRAM STUDI

Program S2-13 Bulan, Dalam Negeri dgn Pembiayaan Cost Sharing Type I dan IV

a). CS Type I :

1. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Syiah Kuala
2. Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas
3. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
4. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung
5. Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung
6. Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada
7. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
8. Magister Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
9. Magister Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan, Univ. Hasanudin
10. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
11. Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor
12. Magister Ekonomi Pembangunan & Perencanaan, Universitas Padjajaran
13. Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya
14. Magister Ilmu Lingkungan Bid. Perencanaan Pengelolaan SDA, Universitas Padjajaran
15. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro
16. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia
17. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada

b). CS Type IV :

1. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya;
2. Program Pascasarjana Perencanaan dan Pembangunan Hukum, Universitas Padjajaran.

Program S2-Double Degree

A). S2 Double Degree Belanda:

- a. Development Planning and Management, MPKD, Universitas Gadjah Mada-Institute for Housing and Urban Development Studies, Rotterdam;
- b. Development Planning and Infrastructure Management, MPWK, Institute Teknologi Bandung-Rijks Universiteit Groningen and ITC, Entschede;
- c. Programme in Economics or Development Economics, PPIE, Universitas Indonesia-Vrije Universiteit, Amsterdam, ISS, The Hague, Tillburg Univesity, Tillburg;
- d. Programme in Geoinformation for Spatial Planning and Risk Management, Geography, UGM - ITC, Entschede;
- e. Integrated Lowland Management, UNSRI - UNESCO, IHE, Delft.

B). S2 Double Degree Perancis:

- a. Master of Urban ad Regional Development and Urban Planning, MPWK-Undip - Universite de Paris VIII;
- b. Master of Urban and Regional Development and Urban Planning, MPWK-Undip - Universite de Paris X;
- c. Master of Urban and Regional Development and Coastal Development, MPWK-Undip - Universite de la Rochelle;
- d. Master of Urban and Regional Development and Coastal Development, MPWK-Undip - Universite de Britagne Oxidentale;
- e. Master of Urban and Regional Development and Urban Infrastructure Mgmt, MPWK-Undip - ENTPE;
- f. Master of Urban Planning Studies, MPWK-Undip - Universite de Paris I;

C). S2 Double Degree Jepang:

No	Fakultas/ Universitas	Bidang Studi	Program Studi/Universitas	Bidang Studi
1	Fakultas Ekonomi/Uni versitas Indonesia	Ilmu Ekonomi & Ek. Pemb.	a Grad. Sch. of Int'l Relations/International University of Japan (IUJ)	International Development Program, Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning
			b Hiroshima Univesity	Economic, Development Economic
			c Int'l Grad. Sch. of Social Science/Yokohama National University	Economic, Development Economics
			d Graduate Institute for Public Studies (GRIPS)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			e Kobe Univesity	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration
2	MEP-UGM	Ekonomi & Ek. Pemb	a Graduate Institute for Public Studies (GRIPS)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			b Grad. Sch. of Int'l Relations/International University of Japan (IUJ)	International Development Program, Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning

			c Hiroshima Univesity	Economic, Development Economic
			d Takushoku University	International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration
			e Kobe Univesity	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration
			f Int'l Grad. Sch. of Social Science/Yokohama National University	Economic, Development Economics
3	MPWK-ITB	Perencanaan Wilayah Kota	a Graduate Institute for Public Studies (GRIPS)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			b Ritsumeikan University	Economics, International Relations, Policy Science, Enironmental & Urban Engineering, Accounting and Management
			c Kobe Univesity	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration
			d Grad. Sch. of Media and Governance/Keio University	Media & Governance, Public Administration
4	MPKD-UGM	Perencanaan Kota & Daerah	a Graduate Institute for Public Studies (GRIPS)	International Development Program, Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning
			b Ritsumeikan University	Economics, International Relations, Policy Science, Enironmental & Urban Engineering, Accounting and Management
			c Takushoku University	International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration
			d Kobe Univesity	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration
			e Grad. Sch. of Media and Governance/Keio University	Media & Governance, Public Administration
5	MAP-UNIBRAW	Administrasi Publik	a Graduate Institute for Public Studies (GRIPS)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			b Ritsumeikan University	Economics, International Relations, Policy Science, Enironmental & Urban Engineering, Accounting and Management
			c Takushoku University	International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration

Program S2-Luar Negeri

Peserta akan diberikan Program Pelatihan Persiapan Bahasa *English for Academic Purposes* (EAP) sekurang-kurangnya selama 5,5 bulan, dan Persiapan Bahasa Perancis bagi yang akan ke Perancis. Setelah mengikuti program EAP, peserta diberikan kesempatan untuk melamar ke universitas pilihan di berbagai Negara yang diminati.

Program S3 Linkage

Program S3 *Linkage* hanya tersedia antara universitas di Indonesia dengan Perancis dan Jepang. Program-program studi yang tersedia adalah sama dengan program S2 *Double Degree* Perancis; sedangkan program-program studi di Jepang juga sama dengan program S2 *Double Degree* Jepang, kecuali program yang bermitra dengan IUJ karena IUJ adalah universitas yang tidak menyediakan program S3 (Doktor).

Program S3 Dalam Negeri

1. Universitas Diponegoro : Ilmu Ekonomi;
2. Universitas Padjajaran : Manajemen Bisnis;
3. Institut Pertanian Bogor : (1) Ekonomi Pertanian, (2) Penyuluhan Pembangunan, (3) Sosialisasi Pedesaan, (4) Komunikasi Pembangunan Pertanian & Pedesaan;
4. Universitas Gadjah Mada : (1) Ekonomi, (2) Manajemen, (3) Kebijakan Publik;
5. Institut Teknologi Bandung : (1) Planologi, Teknik & Manajemen Industri, (2) Pernc. Wilayah & Kota;
6. Universitas Brawijaya : Ilmu Administrasi dan Ilmu Ekonomi;
7. Universitas Indonesia : Ilmu Ekonomi.

D. PROSEDUR PELAMARAN

1. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas, dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2, serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S3 untuk yang melamar beasiswa S3, dengan mengisi formulir pendaftaran dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui pejabat pengelola kepegawaian atau atasan langsung (minimal eselon II). Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi, dan program/topik beasiswa yang diminati;
2. Pelamar yang diprioritaskan adalah para: (a) perencana fungsional perencana; (b) perencana di instansi perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan; (c) PNS lain yang direncanakan bekerja di instansi atau unit perencanaan;
3. Pusbindiklatren telah mengirimkan formulir pendaftaran ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Sekda, BKD, dan Ketua Bappeda. Untuk mendapatkan formulir tersebut dapat menghubungi pejabat yang bersangkutan, atau dapat didownload pada situs kami: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.
4. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang **bermaterai dan bertandatangan asli** dengan persetujuan dari atasan langsung (minimal eselon II). Untuk yang menyampaikan melalui faksimile, kami tidak akan memproses usulan tersebut.
5. Formulir pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
 - (a). Ijazah dan transkrip S1/S2 yang telah dilegalisir;
 - (b). Foto kopi SK Pengangkatan PNS 100% pada golongan III/a, atau SK pengangkatan terakhir, yang telah dilegalisir;
 - (c). Khusus bagi para pejabat fungsional perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - (d). Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir (**Lampiran 2**).

Formulir serta dokumen pendukungnya **dapat disampaikan langsung** kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310, atau dapat dikirimkan melalui pos ke alamat: Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta 10320.

E. KOMPONEN BIAYA BEASISWA BAGI PROGRAM GELAR S2 DOUBLE DEGREE

1. Pembiayaan diklat menjadi tanggungan bersama antara Pusbindiklatren dan instansi asal peserta, dalam suatu mekanisme pembiayaan bersama (*Cost Sharing tipe I*);
2. Kesanggupan Instansi Pengirim untuk menanggung biaya ini dikirimkan kepada Pusbindiklatren dalam bentuk Surat Kesediaan *Cost-Sharing* (setelah ada kepastian penempatan calon peserta).
3. Komponen-komponen pembiayaan yang menjadi bagian dari Pusbindiklatren dan Instansi Asal Peserta dibagi menjadi:

(a). Komponen yang dibiayai oleh Pusbindiklatren

Uang Kuliah	Sesuai Program
Tunjangan Biaya Hidup:	
• Peserta Luar Kota	Rp. 875.000,-/Bln
• Peserta Dalam Kota Plus	Rp. 400.000,-/Bln
• Peserta Dalam Kota	Rp. 0,-
Tunjangan Buku	Rp. 160.000,-/Bln
Tunjangan ATK	Rp. 65.000,-/Bln
Transport Lokal	Rp. 75.000,-/Bln
Sewa Komputer	Rp. 75.000,-/Bln
Tunjangan Thesis	Rp.3.900.000,-

(b). Komponen yang dibebankan kepada Pemda Asal Peserta

- (a). Transport dan akomodasi seleksi peserta (keikutsertaan dlm TPA & TOEFL)
- (b). Tiket domestik pergi-pulang (kota asal - kota tempat diklat)
- (c). Tunjangan Penempatan awal, minimal 5 hari perdiem
- (d). Tambahan uang saku
- (e). Biaya pengurusan dokumen keberangkatan (**Bagi Peserta *Double Degree* & Luar Negeri**)
 - (1). Biaya pembuatan passport Rp. 350.000,-
 - (2). Biaya medical check-up Rp. 250.000,-
 - (3). Biaya Legalisir & Penerjemahan:
 - Penerjemahan & Legalisir akte Rp. 350.000,-
 - Legalisir di Deplu dan Depkeh Rp. 300.000,-
 - Legalisir I di Kedutaan besar Rp. 300.000,-
 - Legalisir II di Kedutaan besar Rp. 300.000,-
 - (4). Biaya transport *pre-departure* Program Rp. 400.000,-

F. KOMPONEN BIAYA BEASISWA BAGI PROGRAM GELAR S2 DALAM NEGERI 13 BULAN

Mekanisme pembiayaan untuk beasiswa program gelar dalam negeri 13 Bulan terbagi ke dalam 2 kategori yaitu dengan mekanisme *cost-sharing* tipe I dan *cost-sharing* tipe IV.

I. Dengan mekanisme *cost-sharing* tipe I

1. Pembiayaan diklat menjadi tanggungan bersama antara Pusbindiklatren dan instansi asal peserta, dalam suatu mekanisme pembiayaan bersama (*Cost Sharing*);
2. Kesanggupan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menanggung biaya ini dikirimkan kepada Pusbindiklatren dalam bentuk Surat Kesediaan *Cost-Sharing* (setelah ada kepastian penempatan calon peserta).
3. Komponen-komponen pembiayaan yang menjadi bagian dari Pusbindiklatren dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dibagi menjadi:

(a). Komponen yang dibiayai oleh Pusbindiklatren

Uang Kuliah	Sesuai Program
Tunjangan Biaya Hidup:	
• Peserta Luar Kota	Rp. 875.000,-/Bln
• Peserta Dalam Kota Plus	Rp. 400.000,-/Bln
• Peserta Dalam Kota	Rp. 0,-
Tunjangan Buku	Rp. 160.000,-/Bln
Tunjangan ATK	Rp. 65.000,-/Bln
Transport Lokal	Rp. 75.000,-/Bln
Sewa Komputer	Rp. 75.000,-/Bln
Tunjangan Thesis	Rp.3.900.000,-

(b). Komponen yang dibebankan kepada Pemda Asal Peserta

- (a). Transport dan akomodasi seleksi peserta (keikutsertaan dlm TPA & TOEFL)
- (b). Tiket domestik pergi-pulang (kota asal - kota tempat diklat)
- (c). Tunjangan Penempatan awal, minimal 5 hari perdiem
- (d). Tambahan uang saku

II. Dengan mekanisme *cost-sharing tipe IV*

1. Pembiayaan diklat menjadi tanggungan bersama antara Pusbindiklatren dan instansi asal peserta, dalam suatu mekanisme pembiayaan bersama (*Cost Sharing*);
2. Kesanggupan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menanggung biaya ini dikirimkan kepada Pusbindiklatren dalam bentuk Surat Kesiapan *Cost-Sharing* (setelah ada kepastian penempatan calon peserta).
3. Komponen-komponen pembiayaan yang menjadi bagian dari Pusbindiklatren dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dibagi menjadi:

(a). Komponen yang dibiayai oleh Pusbindiklatren

(a). Uang Kuliah	Sesuai Program Studi
(b). Tunjangan Thesis	Rp.3.900.000,-

(b). Komponen yang dibebankan kepada Pemda Asal Peserta

(a)	Transport dan akomodasi seleksi (TPA & TOEFL)	
(b)	Tiket domestik pergi-pulang (kota asal - kota tempat diklat)	
(c)	Tunjangan Penempatan awal	Minimal 5 hari perdiem
(d).	Tunjangan Biaya Hidup:	
	• Peserta Luar Kota	Rp. 875.000,-/Bln
	• Peserta Dalam Kota Plus	Rp. 400.000,-/Bln
	• Peserta Dalam Kota	Rp. 0,-
(e)	Tunjangan Buku	Rp. 160.000,-/Bln
(f)	Tunjangan ATK	Rp. 65.000,-/Bln
(g)	Transport Lokal	Rp. 75.000,-/Bln
(h)	Sewa Komputer	Rp. 75.000,-/Bln
(i)	Uang saku	Sesuai kemampuan daerah
(j)	Biaya pengurusan dokumen keberangkatan	

G. SANKSI

1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak, maka berdasarkan Surat Perjanjian, peserta **harus** mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PPA sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa, kepada negara;
2. Peserta akan dikenakan sanksi dari Pusbindiklatren jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti diklat ditemukan ketidaksesuaian data yang diinformasikan dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren (formulir pendaftaran) dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren yang tercantum dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana;
3. Sanksi yang dimaksud pada poin di atas dapat berupa:
 - pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;
 - pembatalan pemberian beasiswa dan penggantian biaya seleksi jika diketahui dalam proses penempatan;
 - pembatalan studi, dan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren atas nama peserta sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa, kepada kantor kas negara, jika diketahui selama diklat berlangsung.

FORMAT PERNYATAAN RENCANA STUDI

- Paragraf 1 : Latar Belakang Pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud mengambil program S2 dan S2 untuk mereka yang bermaksud mengambil program S3;
- Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;
- Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;
- Paragraf 4 : Rencana tindak atau *action plan* yang akan dilakukan setelah mendapat gelar pendidikan yang lebih tinggi (S2 atau S3) dikaitkan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaannya serta dampaknya terhadap kinerja instansi asal pada khususnya dan terhadap negara ini pada umumnya.

(Surat Kesiediaan Cost-Sharing Tipe I)

.....,..... (tempat/tgl/bln/thn)

Nomor :
 Lamp. :(berkas)
 Perihal : Kesiediaan Pembiayaan Diklat
 a.n. 1. Sdr. X
 2. Sdr.Y
 3. Sdr.Z

Kepada Yth.
 Sdr. Kapusbindiklatren
 Bappenas
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Sestama Bappenas, nomor: /Ses/..../2007, tentang ketentuan pembiayaan *cost sharing* untuk program gelar yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA	ITEM MANDATORY	JUMLAH (dalam Rp.)	ITEM VOLUNTARY	ITEM VOLUNTARY
					(dalam Rp.)
1	X				
2	Y				
3	Z				

Demikian, mohon kami mendapat jawaban atas usulan kami tersebut di atas dalam waktu tidak terlalu lama. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah.....,

.....)
 NIP:

Tembusan Yth.:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Penyelenggara Diklat;
3. Sesmeneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Peserta diklat yang bersangkutan.

Catatan:

Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal berupa:
 a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi (kecuali ke luar negeri atau double degree);
 b. Uang saku.

Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara sukarela akan ditanggung oleh instansi asal.

(Surat Kesiediaan Cost-Sharing Tipe IV)

.....,..... (tempat/tgl/bln/thn)

Nomor :
 Lamp. :(berkas)
 Perihal: Kesiediaan Pembiayaan Diklat
 a.n. 1. Sdr. X
 2. Sdr. Y
 3. Sdr. Z

Kepada Yth.
 Sdr. Kapusbindiklatren
 Bappenas
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan surat program Pascasarjana, Universitas, nomor/...../2007, tentang ketentuan pembiayaan *cost sharing* tipe IV untuk program gelar Pascasarjana, Universitas Program 13 Bulan yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA	ITEM MANDATORY	JUMLAH (dalam Rp.)	ITEM VOLUNTARY	ITEM VOLUNTARY
					(dalam Rp.)
1	X				
2	Y				
3	Z				

Demikian, mohon kami mendapat jawaban atas usulan kami tersebut di atas dalam waktu tidak terlalu lama. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah.....,

.....)
 NIP:

Tembusan Yth.:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Penyelenggara Diklat;
3. Sesmeneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Peserta diklat yang bersangkutan.

Catatan:

Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal pada mekanisme *cost sharing* tipe IV berupa:

- a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi dalam rangka seleksi dan studi peserta;
- b. Transport pergi-pulang (kota asal-kota tempat diklat);
- c. Tunjangan Penempatan awal, minimal 5 hari perdiem; jika tidak dapat pulang pergi ke tempat asal dan harus mencari pondokan di tempat diklat;
- d. Biaya hidup;
- e. Tunjangan buku;
- f. Tunjangan studi lainnya (ATK, sewa computer, transport lokal);
- g. Tambahan uang saku

Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara sukarela akan ditanggung oleh instansi asal.